

DETERMINAN FRAUD IN DISTRICT MERTOYUDAN

Determinan *Fraud* Di Desa Se Kecamatan Mertoyudan

Eka Ferranika Islamiyah

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: ekaferranikaislamiyah@gmail.com

Elfa Fitrika Dewi Handayani

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: efitri500@gmail.com

Ainun Farida

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: ainunfrd@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of internal control, adherence to accounting rules, individual morality, information asymmetry, and law enforcement against fraud in the village of Mertoyudan District. The sample in this study were 47 copies using purposive sampling technique. This study uses SPSS 23 data processing with multiple regression analysis tools. Testing shows that law enforcement has a positive effect on fraud. Meanwhile, the effectiveness of internal control, individual morality, information asymmetry, and compliance with accounting rules do not affect fraud.

Keywords: *effectiveness of internal control, compliance with accounting rules, individual morality, information asymmetry, law enforcement, and fraud*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menguji keefektivan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, asimetri informasi, dan penegakan hukum terhadap fraud di desa se Kecamatan Mertoyudan. Sampel pada penelitian ini sebanyak 47 eksemplar dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pengolahan data SPSS 23 dengan alat analisis regresi berganda. Pengujian menunjukkan bahwasannya penegakan hukum berpengaruh positif terhadap fraud. Sedangkan, keefektivan pengendalian internal, moralitas individu, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi tidak mempengaruhi *fraud*.

Kata Kunci: keefektivan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, asimetri informasi, penegakan hukum, dan *fraud*

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya, negara memberikan kewenangan desa untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.

The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* dalam beberapa klasifikasi seperti penyimpangan atas *asset*, pernyataan palsu, dan korupsi. Konsep kecurangan (*fraud*) seperti penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas (Chandra dan Ikhsan, 2015). *Corruption perception index* selaku badan transparansi internasional tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-90 dari 176 negara yang melakukan korupsi. Sedangkan, berdasarkan tabulasi data ICW selama tahun 2016-2017 tentang kecenderungan *fraud* ditemukan 110 kasus yang berkaitan dengan dana desa. *Kasus tersebut menyeret dari 139 aktor, 107 di antaranya merupakan kepala desa (antikorupsi.org.id)*. Selain itu, berdasarkan data KP2KKN tahun 2016 Jawa Tengah hanya ada 2 kabupaten yang dinyatakan bersih dari korupsi yaitu kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Blora. Kabupaten Magelang termasuk diantara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum bebas dari tindak korupsi.

Ratnayani, dkk (2014) mengatakan bahwasannya efektivitas pengendalian internal digunakan untuk mengontrol kegiatan operasional suatu instansi. Faktor lainnya yang mampu meminimalisir kecenderungan kecurangan adalah moralitas individu. Liyanarachchi (2009) dalam Saputra, dkk (2015). Moralitas individu adalah ide-ide tindakan manusia mana yang baik dan mana yang wajar. Penegakan hukum di sektor publik tidak kalah penting untuk mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Pentingnya penegakan hukum dikarenakan 79% pelaku dihukum lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Penelitian mengenai kecurangan dilakukan oleh Najahningrum, (2013) dengan persepsi pegawai Dinas Provinsi DIY ditemukan hubungan negatif antara keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud*. Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*, hal ini juga dikatakan oleh Permana, (2017) dalam penelitian di BPKP. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda dan Ikhsan, (2015) dengan hasil pengendalian internal berpengaruh negatif terjadinya *fraud*.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di desa se Kecamatan Mertoyudan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Mertoyudan merupakan kecamatan di kabupaten magelang yang mendapatkan dana desa terkecil.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Theory trianggel fraud

Statement of auditing standart dalam norbarani (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*: *Pressure* (tekanan) yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untukmelakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan kecurangan.

Kecurangan yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. *Opportunity* (kesempatan) yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Diantara elemen *fraud diamond* yang lain, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. *Rationalization* (rasionalisasi) yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya (Rini, 2012).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Efektivitas Pengendalian internal terhadap *fraud*

Efektifitas pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan manajemen (Saputra dkk., 2015). Tujuan dari keefektivan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang tercermin dalam keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Permana, (2017) menyatakan bahwa keefektivan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Downida dan Riharjo, (2017) yang menemukan bahwa keefektivan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap tingkat kecenderunganj kecurangan akuntansi (*fraud*) pada SKPD Kota Kediri. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya sistem pengendalian yang dijalankan dengan baik maka peluang terjadinya *fraud akan* semakin kecil. Chandra dan Ikhsan, (2015) menemukan bahwasanya sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

H1. Keefektivan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap *fraud*

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar (Fatun, 2013). Penelitian Aisah (2015), menunjukkan bahwasanya Asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud. Hasil ini sama yang diperoleh dari Ahriarti (2015) semakin tinggi asimetri yang bearada di organisasi mengakibatkan kemungkinan kecenderungan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

H2. Asimetri Informasi positif terhadap *fraud*

Pengaruh Komitmen organisasi terhadap *fraud*

Komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi menurut Mowday (1982) dalam Sopiah (2008:155). Penelitian Najahnigrum (2013), menunjukkan bahwasanya komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin rendahnya kecenderungan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*

Pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud*

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Najahnigrum (2013) menunjukkan bahwasannya penegakan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. Semakin tinggi penegakan yang dilakukan oleh pemerintah maka akan mengurangi kecenderungan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H4. Penegakan berpengaruh negatif terhadap *fraud*

Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap *fraud*

Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan standar akuntansi dibuat untuk menyeragamkan pelaporan keuangan. Aturan akuntansi dibuat untuk mengatasi masalah keagenan, apabila tidak dilaksanakan akan berpengaruh terhadap kredibilitas informasi pada laporan keuangan tidak akan tercapai. Penelitian Radhiah (2016) menunjukkan bahwasannya efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. Semakin baik ketaatan aturan akuntansi maka akan mengurangi kecenderungan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap *fraud*

C.METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini meliputi perangkat desa dan anggota pengelola dana desa Kecamatan Mertoyudan. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam melakukan penelitian dan pengujian data. Sampel dalam penelitian ini adalah camat/lurah, sekretaris, kasi/kassubag, seta bendahara atau pegawai bagaian keuangan dengan kriteria bekerja lebih dari 3 tahun. Sedangkan, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
1 Keefektivan Pengendalian Internal (PI)	Proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan manajemen. Elder, Beasley, Arens (2008: 353)	Instrumen 6 butir pernyataan dengan skala likert (Rahayuningsih, 2016) mengacu pada

		(Radhiah, 2016)
2 Asimetri Informasi (AI)	Keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar (Fatun, 2013).	Instrumen 4 butir pernyataan dengan skala likert (Santoso, 2017) mengacu pada (Najahnigrum, 2014)
3 Komitmen Organisasi (KO)	Dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Mowday (1982) dalam Sopiah (2008:155)	Instrumen 3 butir pernyataan dengan skala likert (Santoso, 2017) mengacu pada (Najahnigrum, 2014)
4 Penegakan (P)	Pendapatnya mengenai penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Raharjo (2000;175-183)	Instrumen 2butir pernyataan dengan skala likert (Santoso, 2017) mengacu pada (Najahnigrum, 2014)
5 Ketaatan Aturan Akuntansi (KAA)	Standar akuntansi dibuat untuk menyeragamkan pelaporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (2007)	Instrumen 3butir pernyataan dengan skala likert (Rahayuningsih, 2017) mengacu pada (Radhiah, 2016)
6 Kecenderungan <i>fraud</i> (Y)	Tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. (Harahap,2002)	Instrumen 3 butir pernyataan dengan skala likert (Rahayuningsih, 2017) mengacu pada (Radhiah, 2016)

Metoda Analisis Data

Sebelum dianalisis dan diuji hipotesisnya, terlebih dahulu dilakukan uji validitas menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α) untuk melihat item dan keseluruhan kuesioner itu valid dan reliabel atau tidak. Setelah itu barulah melakukan analisis dan pengujian hipotesis dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji F (*Goodness of fit test*) dan Uji t. Model persamaan Regresi Linier berganda :

$$F = a + EP + AI + KO + PH + KAA + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

EP = Efektivitas pengendalian Internal

AI = Asimetri Informasi

KO = Komitmen Organisasi

PH = Penegakan hukum

KAA = Ketaatan aturan Akuntansi
e = eror

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah perangkat desa di desa se Mertoyudan. Kuesioner yang disebar sebanyak 60 kuesioner, sedangkan yang kembali sebanyak 50 kuesioner (*response rate* 83,33%), tetapi yang bisa digunakan dan diolah dalam penelitian ini berjumlah 47 kuesioner. Sisanya tidak dapat digunakan karena kurang lengkapnya jawaban dan data.

Uji Validitas

Parameter yang digunakan untuk uji validitas yaitu dengan melihat nilai faktor *loading*. Hasil uji validitas pada menunjukkan bahwa ada beberapa indikator pada suatu konstruk di dalam model pengukuran tidak memenuhi syarat, dengan nilai *factor loading* < 0,5, yaitu EP 2 = 0,372. Sehingga tidak digunakan dalam analisis berikutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
EPI	0,703	Reliabel
AI	0,815	Reliabel
KO	0,717	Reliabel
PH	0,712	Reliabel
KAA	0,711	Reliabel
F	0,770	Reliabel

Hasil pengujian reliabilitas yang terlihat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel Efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, komitmen organisasi, penegakan hukum, ketaatan aturan akuntansi, dan *fraud* memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3
Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,334	0,405		0,827	0,413
EP	0,216	0,173	0,186	1,246	0,220
AI	-0,012	0,092	-0,014	-0,128	0,899
KO	-0,200	0,156	-0,241	-1,281	0,208
PH	0,833	0,168	0,827	4,959	0,000
KAA	0,073	0,147	0,078	0,500	0,620

$$F = 0,334 + 0,216EP - 0,012AI - 0,200KO + 0,833PH + 0,073KAA + e$$

Uji Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R square* pada besarnya R² sebesar 0,613. Hal ini berarti bahwa variabel efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, komitmen organisasi, penegakan hukum, dan ketaatan aturan akuntansi dalam menjelaskan fraud sebesar 61,3% sedangkan sisanya (100% - 61,3% = 38,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor dari luar model pada penelitian ini.

Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai *p-value* = 0,000 < α = 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bagus atau fit.

Uji t

Tabel 4

Uji t

Variabel	P Value	Keterangan
Efektifitas Pengendalian Internal	0,220	H1 tidak diterima
Asimetri Informasi	0,899	H2 tidak diterima
Komitmen Organisasi	0,208	H3 tidak diterima
Penegakan Hukum	0,000	H4 diterima
Ketaatan Aturan Akuntansi	0,620	H5 tidak diterima

Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap *fraud*

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa $p \text{ value } 0,413 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud* sehingga **H₁ tidak diterima**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Artinya, besar kecilnya pengaruh efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan teori *triangel fraud* menunjukkan bahwasanya pengendalian internal yang belum dimaksimalkan akan mengakibatkan *fraud* ditingkat desa. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Permana (2017) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Downida dan Riharjo, (2017) yang menemukan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap tingkat kecenderungan *fraud*.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap *fraud*

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa $p \text{ value } 0,220 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri tidak berpengaruh terhadap *fraud* sehingga **H₂ tidak diterima**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Artinya, besar kecilnya pengaruh efektivitas asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan teori *triangel fraud* adanya asimetri informasi mampu mengakibatkan *fraud* didesa. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Aisah (2015), yang menunjukkan bahwasanya asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*.

Pengaruh Komitmen organisasi terhadap *fraud*

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa $p \text{ value } 0,899 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap *fraud* sehingga **H₃ tidak diterima**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Artinya, besar kecilnya pengaruh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan teori *triangel fraud* adanya komitmen organisasi mampu mengakibatkan *fraud* didesa. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahnigrum (2013), yang menunjukkan bahwasanya komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud*

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa $p \text{ value } 0,00 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* sehingga **H₄ diterima**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud*. Artinya, besar kecilnya pengaruh penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan teori *triangel fraud*. Berdasarkan pada teori *triangel fraud* menunjukkan bahwasanya penegakan hukum yang rendah mampu mengakibatkan terjadinya *fraud* di tingkat desa. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahnigrum (2013), menunjukkan bahwasannya penegakan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*.

Pengaruh Ketaatan aturan akuntansi terhadap *fraud*

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa $p \text{ value } 0,507 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap *fraud* sehingga **H₅ tidak diterima**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Artinya, besar kecilnya pengaruh ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan teori *triangel fraud* ketaatan aturan akuntansi yang rendah mengakibatkan *fraud*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Adhiah (2016) yang menunjukkan bahwasannya efektivitas ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*.

E.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sedangkan efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, komitmen organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap *fraud*. Beberapa saran yang direkomendasikan untuk penelitian berikutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan objek lain.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti budaya organisasi dan moralitas individu.

REFRENSI

- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10.
- Adinda, Y. M., & Ikhsan, S. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten, 4(3), 1–9.
- Chandra, D. P., & Ikhsan, S. (2015). Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan. *Jurnal Akuntansi*, 4(3), 1–9.
- Downida, A. N., & Riharjo, I. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Dwi, M., Yadnya, K., Sinarwati, N. K., Yuniarta, G. A., & Ganesha, U. P. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada KSP Kecamatan Buleleng), 7.
- Kohlberg, Lawrence.2017. Stage of Moral Development. Working paper (online). <http://info.psu.edu.sa>. Diakses 20 Mei 2017
- KPK.ac.id."Kasus Korupsi di Indonesia.2017
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi fraud: Pegawai Dinas Provinsi DIY, 2(3), 259–267.
- Permana, B. A. (2017). Determinant Of Fraud In Government Agency : Empirical Study At The Finance And Development Supervisory Agency (BPKP) Of Jakarta Representative Office. *Asia Pasific Fraud Journal*, 2(1), 93–108.
- Peraturan Bupati Magelang nomer 8 tahun 2017
- Prawira, I. M. D., Herawati, N. T., & Darmawan, N. A. S. (2014). Efektivitas Pengendalian

- Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng) E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 2.
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). The Effect of Individual Morality and Internal Control on the Propensity To Commit Fraud : *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(2), 208–219.
- Putu, N., Widiutami, S., Luh, N., Erni, G., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1).
- Ratnayani, P. A., Sujana, E., Ari, N., & Darmawan, S. (2014). Good Governance Terhadap Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 1(1).
- Saputra, K., Ari, N., Dharmawan, S., & Purnamawati, I. G. A. (2015). Pengaruh Pengendalian Intern Kas , Implementasi Good Governance Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Lpd Di Kabupaten Buleleng Bagian Timur). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1)
- Sari, N. L. P. P., Yuniarta, G. A., & Adiputra, I. M. P. (2015). Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*, 3(1).
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susandra, F., & Hartina, S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud p ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bogor. *JURNAL AKUNIDA ISSN 2442-3033*, 3, 35–55.
- Wijaya, K. D. S., Sujana, 1Edy, Purnamawati, I. G. A., & Jurusan. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Whistleblowing Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kecamatan Gerokgak. *E-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 1.
- Wulandari, A. F., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2017). Persepsi Pegawai Bagian Keuangan Dinas Kabupaten Sragen Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 765–771.
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 8(10), 67–76.